

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak merdeka tahun 1947, sejarah Pakistan tak bisa lepas dari dominasi militer. Dalam 50 tahun terjadi tiga kali kudeta militer dan terakhir dilakukan Jenderal Pervez Musharraf tahun 1999. Meski pernah dipimpin pemerintahan sipil namun negeri ini tetap tak bisa menjauh dari bayang-bayang militer. Dalam ungkapan intelektual Pakistan, Pervez Hoodbhoy, "*All countries have armies, but in Pakistan the army has a country*".¹

Delapan tahun masa kuasi-diktator Musharraf tak menghasilkan cukup perbaikan bagi Pakistan. Data World Bank (2007) menyebutkan sebanyak 73 persen penduduknya masih di jurang kemiskinan. Angka melek huruf di negara ini baru mencapai 50 persen dengan disparitas mencolok antar daerah. Sebaliknya, anggaran militer Pakistan selalu tertinggi di Asia Selatan dalam tujuh tahun terakhir.

Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini, Pakistan juga dihadapkan pada masalah keamanan yang pelik. Serangan dan terror bom dari militan, Taliban, dan Al Qaeda telah menjadi pemandangan sehari-hari di negeri ini. Belum lagi masalah konflik perbatasan Kashmir dengan India yang tidak

kunjung usai hingga saat ini. Hal – hal tersebut adalah sederet panjang masalah yang dihadapi Musharraf sebagai Presiden Pakistan saat ini.

Pakistan menjalankan Pemilu Presiden pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2007 untuk memilih Presiden dan Pemilu Parlemen pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 untuk memilih wakil – wakil rakyat dalam Pemilu Parlemen. Dalam situasi yang serba sulit ini, Musharraf berusaha mempertahankan kekuasaanya sebagai orang nomor satu di negeri tersebut, hal ini menarik minat penulis untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan penulis. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat Musharraf selama menjabat sebagai Presiden Pasca Pemilu Presiden Oktober 2007
2. Sebagai manifestasi dari pengaplikasian teori-teori yang penulis dapatkan selama masih duduk di bangku kuliah.

C. Latar Belakang Masalah :

Selama menjabat sebagai presiden Pakistan setelah melakukan kudeta tidak berdarah pada 1999 Musharraf mengajukan tujuh point agenda pemerintahannya yaitu :

1. Menaikkan akuntabilitas pemerintah
2. Menstabilkan ekonomi Negara
3. Mendepolitisasi lembaga-lembaga negara/birokrasi
4. Mempromosikan harmoni antarpropinsi
5. Menegakkan Hukum dan ketertiban
6. Devolusi kekuasaan
7. Pembaikan Moral nasional.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak satupun dari tujuh point agenda pemerintahan yang diajukan dapat terlaksana, ia sendiri telah melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan beberapa tujuan yang telah dikemukakan di atas.²

Berikut ini adalah berbagai kegagalan kepemimpinan Musharraf selama 8 tahun. Di bidang hankam, telah terjadi –hingga kini– perang sipil di sayap barat Pakistan (Waziristan). Di birokrasi, lembaga-lembaga negara diisi dengan orang-orang militer Musharraf sendiri, hal ini mencerminkan betapa kentalnya praktek nepotisme di Pakistan sedangkan di front ekonomi, hutang nasional Pakistan telah

mencapai \$40 milyar dollar, tertinggi untuk yang pertama kalinya. Sedangkan harga barang kebutuhan pokok telah naik lima kali semenjak tahun 1999. Adapun kemandirian media massa dan peradilan telah direnggut dan diinterferensi keinginan Musharraf dan diserang –secara harfiah/benar-benar diserang– ketika dianggap tidak mau tunduk pada keinginan Musharraf.³

Di bidang Internasionalpun Perves Musharraf dianggap sebagai dictator yang menjalankan Pakistan dengan tangan besi. Pakistan juga memiliki masalah dengan India terkait dengan masalah batas wilayah di daerah Kashmir yang tak kunjung usai hingga saat ini. Belum lagi masalah kebijakan luar negeri Musharraf untuk bekerja sama dengan Amerika dalam menumpas Taliban di Afganistan juga memperburuk situasi keamanan di Pakistan. Hampir setiap hari terdengar suara tembakan ataupun ledakan bom di sana.

"Pakistan telah mengalami sejumlah kekerasan di masa lalu, tapi tidak terlalu mengerikan dibandingkan yang kita lihat kemarin. Ini merupakan warisan Musharraf dan perang terhadap teror yang dilancarkannya," ucap Hassan Abbas, seorang analis politik mantan pejabat Pakistan yang kini meneliti di Belfer Center Harvard University.⁴ Abbas menjelaskan, warga Karachi saat ini sangat mudah sekali membeli senjata untuk melakukan teror. *"Di Karachi, Anda dapat membeli sebuah granat dengan harga di bawah USD10,"* ujarnya.

³ *Ibid*

Begitu kacaunya kondisi keamanan di Pakistan belakangan ini ditenggarai oleh ketidakmampuan Perves Musharraf dalam menjalankan Pemerintahan Pakistan. Krisis ekonomi yang berdampak pada tingginya angka pengangguran di Pakistan telah menciptakan keadaan dimana paham ekstrimisme dapat tumbuh subur di Pakistan. Paham ekstrimisme ini yang digunakan kelompok Taliban untuk membuat kekacauan di Pakistan. Rakyat Pakistan diajarkan bahwa Musharraf adalah musuh agama karena bekerjasama dengan Amerika yang dianggap sebagai musuh seluruh ummat Islam. Oleh karena pemerintahan Musharraf harus segera diakhiri bagaimanapun caranya, walaupun itu dengan cara menyebar terror sekalipun.

Menurut (alm) Benazir Bhutto, Tentara Pakistan pun tak kuasa menghadapi ekstrimis. *"Tentara lumpuh karena karena rakyat tak mendukung, bahkan menjadi bagian dari ekstrimis."* Namun kata Bhutto ekstrimis juga mendapat dukungan dari intelejen, militer, bahkan dari pemerintah sendiri.⁵

Hal ini menjadi pemicu memanasnya suhu politik dan berbagai bentuk aksi protes di Pakistan baik dari golongan rakyat dan juga para politisi khususnya dari kubu oposisi dan para praktisi hukum. Hal ini diperparah dengan kebijakan musharraf untuk memberhentikan Ketua Mahkamah Agung (MA) Iftikhar Muhammad Chaudhry pada 9 Maret 2007 yang lalu.⁶ Pemecatan ini dilakukan musharraf karena ia menganggap Chaudhry tidak kompeten dalam melaksanakan tugas – tugasnya sebagai Ketua Mahkamah Agung.

⁵ Kompas, *Beban Moral Musharraf*, Jumat, 28 Desember 2007 hal 10

⁶ <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=148006>

Pemecatan ini memicu sederetan aksi unjuk rasa dari para pengacara yang melakukan protes. Hal ini mengawali serentetan demonstrasi di seantero negeri. Aksi protes ini berlanjut dengan aksi Protes gabungan pertama yang diorganisir oleh partai-partai oposisi yang diasingkan, mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif pada 26 Maret 2007. Sebanyak 43 orang tewas saat pendukung pemerintah mencegat Chaudhry menghadiri suatu unjuk rasa di bagian selatan kota pelabuhan Karachi. Pemogokan yang diserukan ini sempat melumpuhkan aktivitas di negara itu⁷.

Di tengah situasi yang panas tersebut. Pemilu Pemilihan Presiden tetap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2007 kemarin. Namun hasil pemilihan tersebut ditunda. Pengumuman hasilnya akan diumumkan pada tanggal 17 Oktober terkait dengan masalah Jabatan Militer yang masih dipegang oleh calon Presiden Pervez Musharraf. Penundaan ini terkait dengan Petisi yang diajukan oleh Calon Presiden Wajihuddin Ahmed kepada MA agar pencalonan Musharraf dibatalkan karena Musharraf memiliki jabatan rangkap sebagai Presiden dan juga menjabat sebagai Panglima Tinggi Militer Pakistan.⁸

Pemilu Pemilihan Presiden ini akhirnya berakhir dengan kemenangan Jenderal Perves Musharraf. Musharraf mendapatkan 252 suara dari 257 anggota parlemen nasional. Dia juga memenangi suara serupa dari majelis provinsi. Para anggota parlemen oposisi abstain atau memboikot pemilihan yang mereka sebut tidak konstitusional. Mahkamah Agung mengatakan, pemenang resmi tidak boleh

dinyatakan sampai mereka memutuskan apakah Musharraf boleh mencalonkan diri di saat masih merangkap jabatan sebagai panglima militer. Pendukung Jenderal Musharraf memang menguasai parlemen, karena dalam lima tahun lalu mereka menang dalam pemilu yang disebut-sebut berlangsung tidak adil dan tidak terbuka.

Ketua Pemilihan Umum Qazi Muhammad Farooq mengatakan kepada Majelis Nasional bahwa Musharraf mendapatkan 252 dari 257 suara di majelis rendah dan majelis tinggi. Saingan terdekatnya, Wajihuddin Ahmed, hanya mendapatkan dua suara, dan tiga suara lagi dinyatakan tidak sah. Hasil sama juga diperoleh dalam pemungutan suara di Provinsi Punjab, Sindh, North West Frontier, dan Balochistan.⁹

Walaupun begitu, Pemilu Pemilihan Presiden sendiri ini tidaklah berjalan mulus, Pemilihan presiden di Pakistan berubah menjadi ajang kerusuhan. Di kota Peshawar, polisi menyemprotkan gas air mata terhadap ratusan demonstran yang mau menyerbu gedung dewan perwakilan daerah. Para pengunjuk rasa, yang mayoritas terdiri dari pengacara, membakar potret presiden dan pemimpin militer, Pervez Musharraf dan membakar mobil-mobil. Di Karachi, di sana sini terjadi aksi protes¹⁰.

Belum selesai masalah keabsahan Musharraf menjadi Presiden, publik Pakistan kembali dikejutkan dengan terjadinya teror bom saat Mantan Presiden Benazir Bhutto tiba di Pakistan setelah menjalani 8 tahun masa pengasingannya terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan suaminya. Serangan yang terjadi

⁹ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=183892>

¹⁰ <http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg01507.html>

Kamis (18/10) malam di Karachi menewaskan lebih dari 136 orang dan 300 orang lainnya terluka dalam aksi bom bunuh diri saat pendukung Bhutto menyambut kedatangan mantan PM itu dari pengasingan delapan tahun.¹¹

Beberapa jam setelah serangan bom, muncul tuduhan anggota partai pendukung Bhutto, Partai Rakyat Pakistan (PPP), terhadap pemerintah. PPP menuduh badan intelijen dan keamanan pemerintah gagal mencegah serangan brutal tersebut. *"Jenderal Musharraf mencoba meredam tuduhan terhadap aparatnya dengan mengancam aksi bom tersebut sebagai serangan terhadap demokrasi. Pemerintah Musharraf juga mencoba membela diri dengan mengungkapkan fakta bahwa Bhutto memang memiliki banyak musuh di Pakistan,"* ujar Ahmed Rashid, analis politik di surat kabar Telegraph.¹²

Terkait dengan aksi serangan bom bunuh diri terhadap Benazir Bhutto pada Kamis (18/10) malam di Karachi. Pada 3 November 2007 Musharraf memberlakukan keadaan darurat, membekukan konstitusi, dan menangkap para tokoh yang bertentangan dengan dirinya. Langkah sewenang - wenang yang diambil Musharraf ini membuat ia semakin dibenci rakyatnya. Hal ini membuat keadaan dalam negeri Pakistan semakin bergejolak karena rentetan aksi unjuk rasa yang dilakukan rakyat Pakistan dan para pengacara semakin sering terjadi. Apalagi rangkaian aksi unjuk rasa menentang Musharraf ini selalu berakhir dengan kerusuhan dan bentrok antara militer dengan sipil.

Namun, pada hari Kamis (27/12/2007), publik Pakistan kembali dikejutkan atas tewasnya Mantan PM Benazir Bhutto akibat ditembak penyerang tak dikenal. Setelah menembak Bhutto, pelaku bunuh diri dengan meledakkan bom yang diikatkan di tubuhnya. Penasihat keamanan Bhutto Rehman Malik, menjelaskan Bhutto ditembak dari jarak dekat pada bagian leher. Bhutto kemudian dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong lagi.¹³

Kematian Bhutto ini membawa dampak yang buruk bagi kredibilitas pemerintahan Musharraf karena hampir seluruh mayoritas masyarakat Pakistan menuduh Musharraf sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Benazir Bhutto.

Setelah berhasil mempertahankan diri sebagai Presiden di tengah situasi politik, ekonomi dan hankam yang serba ruwet di Pakistan saat ini, Perves Musharraf berusaha kembali berusaha mempertahankan kekuasaannya di Parlemen melalui Pemilu Parlemen Pakistan 2008.

D. Pokok Permasalahan

Bagaimana usaha yang dilakukan Perves Musharraf untuk mempertahankan kekuasaan menjelang Pemilu Parlemen 18 Februari 2008 ?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Konsep Elit

Selo Sumardjan dalam Pengantar buku tulisan Suzanne Keller 'Beyond the Rulling Class, the Role of Strategic Ellites in Modern Societies' yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa : "Selama suatu masyarakat masih kecil dan beragam tunggal (homogeneous) maka pola kepemimpinannya juga cenderung berbentuk tunggal dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. Akan tetapi apabila anggota masyarakat itu bertambah jumlah anggotanya, lagipula terjadi diservikasi dalam bidang politik, ekonomi dan social, maka pola kepemimpinan yang beragam tunggal itu akan sukar sekali dilestarikan. Apabila struktur masyarakat menjadi beraneka ragam (heterogeneous) maka dengan sendirinya pola kepemimpinannya menjadi beraneka ragam pula. Di tiap – tiap bidang kehidupan masyarakat yang penting akan timbul suatu golongan dengan hierarkhi tersendiri di mana suatu elit atau golongan kecil memegang peranan yang paling berpengaruh di bidangnya."¹⁴

Berdasarkan uraian dia atas dapat ditarik benang merah bahwa terminology elit menunjuk pada seseorang yang mempunyai keunggulan – keunggulan, di mana dengan keunggulan – keunggulan yang melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu.¹⁵ Seseorang atau sekelompok orang yang

¹⁴ Selo Sumardjan pada kata pengantar buku Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, CV Pajawali Jakarta 1984. hal. V – VI

memiliki keunggulan tertentu, dan kemudian dengan keunggulan tersebut mampu berperan menonjol dan mempunyai pengaruh besar dalam cabang kehidupan ekonomi dapat dinyatakan sebagai elit di bidang ekonomi, sementara itu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keunggulan dan kemudian yang bersangkutan mampu memainkan peran menonjol dan mempunyai pengaruh besar di bidang politik dapat dinyatakan sebagai elit di bidang politik; demikian seterusnya di bidang kehidupan lainnya.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya seseorang atau sekelompok orang dengan keunggulan – keunggulan yang dimilikinya mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan ; dimungkinkan yang bersangkutan selain menjadi elit di bidang ekonomi juga menjadi elit di bidang politik.

Merujuk pada konsep di atas, Perves Musharraf sendiri adalah termasuk seseorang yang dengan keunggulan – keunggulan yang dimilikinya mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar pada bidang Militer, dengan kata lain ia adalah seorang Elit Militer.¹⁶ Melalui kudeta militer tidak berdarah pada tahun 1999 akhirnya Musharraf berhasil menjadi seorang Presiden sekaligus Panglima tinggi Militer Pakistan. Dalam hal ini Musharraf yang sejatinya seorang elit militer berhasil juga menjadi elit politik dengan menggunakan peranan dan pengaruhnya yang menonjol di bidang militer.

¹⁶ Untuk lebih jelasnya mengenai karir militer Musharraf, silahkan lihat Bab II DINAMIKA

2. Legitimasi Elit

Dalam pengertian yang relative longgar dapat dinyatakan bahwa pengakuan seseorang terhadap keunggulan orang lain pada hakekatnya menunjukkan 'keabsahan' atas keunggulan yang dimiliki pihak tersebut belakangan. Pengakuan tersebut mutlak diperlukan keberadaannya sebab tanpa adanya pengakuan, maka keunggulan yang dimiliki seseorang tidak mempunyai makna apapun juga. Hilangnya suatu pengakuan berarti hilang pula keunggulan yang ada.

Demikian pula halnya dengan keunggulan yang dimiliki sekelompok kecil individu yang berpredikat elit atas sejumlah besar individu – individu lainnya yang dikenal sebagai massa. Keunggulan kelompok elit terhadap massa mutlak memerlukan pengakuan. Pengakuan terhadap keberadaan elit dapat pula dinyatakan sebagai suatu 'justifikasi' atau 'legitimasi' yang oleh Gaetano Mosca sering diistilahkan sebagai suatu 'political formula' yang maksudnya terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa 'the rulers' dipatuhi kepemimpinannya.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Max Weber menyatakan pendapatnya bahwa terdapat 3 macam 'legitimate domination' yang menunjukkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang lainnya mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya. Ketiga macam 'legitimate domination' tersebut adalah :

¹⁷ Berdasarkan Gaetano Mosca tersebut dapat dilihat pada Mark N. Hagopian, *Regimes, Movement*

a) *Traditional Domination* ; Dominasi tradisional mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah – tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian legitimasi yang diperoleh elit tentu saja juga didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di masyarakat di mana elit tadi berada. Legitimasi yang ada pada dominasi tradisional dapat dilukiskan sebagai kepatuhan yang didasarkan kepada konvensi yang terbentuk menurut tradisi yang berlaku.

Dalam dominasi tradisional dapat diketemukan massa dengan kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi yang ada. Adanya kepercayaan massa terhadap kesucian tradisi yang masih berlaku pada gilirannya akan menghadirkan massa yang mengakui keunggulan individu – individu tertentu atas dasar keyakinan bahwa individu – individu tadi secara tradisi memang memiliki keunggulan. Individu – individu tadi terpilih sebagai pemimpin yang berkuasa bukan atas dasar charisma yang ada pada dirinya ataupun kemampuan yang di milikinya, tetapi semata – mata atas dasar kesepakatan bersama anggota – anggota masyarakat yang sudah mentradisi.

Dalam masyarakat yang masih memberlakukan dominasi tradisional, hubungan yang terjadi antara elit dan massa tidak jarang lebih bernuansa personal. Di masyarakat ini, massa yang mempunyai kesempatan direkrut sebagai staf administrasi di lingkungan elit misalnya, lebih didasarkan pada pertimbangan loyalitas pribadi

jarang pula mereka yang diangkat menjadi staf tersebut secara ekonomis masih tergantung pada elit. Dalam kondisi seperti itu maka tidak berlebihan kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara elit dengan staf administrasinya bersifat kekeluargaan; dan dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa system pemerintahan yang ada di masyarakat tersebut lebih merupakan perpanjangan atau perluasan dari urusan rumah tangga elit penguasa.

Melalui uraian di atas menunjukkan bahwa di masyarakat yang menganut dominasi tradisional tidak tertutup kemungkinan terdapat massa yang mempunyai kesetiaan pribadi yang relative tinggi terhadap elit yang bertindak sebagai penguasa dan sebaliknya, elit inipun mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan massa. Akan tetapi walaupun hubungan antara elit dan massa diikat oleh kesepakatan bersama yang sudah mentradisi, masih terdapat keleluasaan bagi para elit untuk secara pribadi mempergunakan otoritasnya sesuai dengan kehendaknya. Dengan otoritas yang melekat pada dirinya, elit dapat membatalkan atau tidak mengakui berlakunya sesuatu hal yang sudah mentradisi, dan dalam hal seperti ini massa suka atau tidak suka harus mentaatinya.

Di suatu masyarakat dimana berlaku tipe dominasi tradisional, eksistensi elit yang berkuasa didasarkan pada nilai – nilai yang secara tradisi masih berlaku dan dipatuhi serta dianggap suci oleh

administrasi lebih banyak mendasarkan pada pertimbangan pribadi; dan dalam mengeluarkan kebijaksanaan juga lebih sering mendasarkan pada pertimbangan yang secara rasional perlu dipertanyakan. Hal yang perlu dicatat sehubungan dengan elit tradisional tersebut adalah bahwa mereka mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan kondisi status quo dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman bagi mereka.¹⁸

- b) *Charismatic Domination* : Dominasi Charismatic merupakan tipe dominasi yang mendasarkan pada charisma yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Dominasi kharismatik mendasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki elit sebagai seorang pribadi. Istilah Kharisma dipergunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjukkan pada daya tarik pribadi yang ada pada individu sebagai elit yang berkuasa. Perihal charisma, Weber memberi pengertian sebagai “suatu sifat tertentu dari kepribadian seseorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat – sifat gaib, sifat unggul atau paling sedikit dengan kekuatan – kekuatan yang khas dan luar biasa.”¹⁹ Dominasi kharismatik muncul dalam konteks social yang beraneka ragam, dan oleh karena itu pula elit yang muncul dalam masyarakat dengan dominasi tipe ini juga bervariasi jenisnya. Atau dengan

¹⁸ Sartono Kartodirdjo. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. vii

pernyataan lain yang lebih kongkrit, dalam masyarakat tersebut akan dengan mudah ditemui berbagai macam jenis elit.

Elit yang kemunculannya didasarkan pada charisma yang dimiliki, pada umumnya akan berupaya menunjukkan 'bukti' tentang ke-elitannya dengan cara mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan hal – hal yang bersifat ajaib yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat awam, ataupun dengan cara mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya telah menerima wahyu atau pulung atau dengan melakukan tindakan yang diluar kewajaran. Semakin mampu individu yang bersangkutan menunjukkan 'bukti' yang hebat dan relative langka, maka akan semakin tinggi pula legitimasi yang diperolehnya sebagai elit yang berkuasa.

- c) *Legal-rational Domination* : Dominasi legal – rasional pada hakekatnya didasarkan kepada kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundang-undangkan secara resmi. Individu yang berperan sebagai elit di masyarakat yang memberlakukan dominasi type ini diakui keberadaannya atas dasar kemampuan yang dimilikinya dan memenuhi persyaratan menurut peraturan yang berlaku.

Demikian pula hal yang berkaitan dengan seleksi bagi individu-individu yang dapat menduduki posisi elit juga diatur secara tegas oleh peraturan yang secara resmi berlaku. Dalam peraturan tersebut

dibutuhkan dari seseorang untuk dapat menduduki posisi tertentu. Persyaratan bagi suatu posisi tertentu belum sama dengan persyaratan yang diperlukan bagi posisi lainnya. Semakin tinggi posisi, maka persyaratan yang diperlukan semakin tinggi pula. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena semakin tinggi posisi akan diikuti oleh kewenangan yang semakin besar pula; dan tentunya posisi dengan kewenangan yang tinggi membutuhkan kemampuan yang semakin tinggi dari individu yang bersangkutan.

Sebagai akibat dari kesepakatan seperti tersebut diatas, maka individu-individu yang tidak memiliki kemampuan akan sulit untuk dapat menduduki posisi tertentu sebagai elit. Hanya individu-individu yang mempunyai kemampuan dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama dalam peraturan akan diakui sebagai elit. Anggota masyarakat lainnya, suka atau tidak suka, akan menerima kenyataan ini dan menyatakan kesediaan dirinya sebagai massa yang siap diatur yang diperintah oleh elit.

Menurut Weber, dominasi legal-rasional diwujudkan dalam bentuk organisasi birokrasi demokratis. Bagi Weber, birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi social yang paling efisien, sistematis dan dapat diramalkan. Bentuk organisasi birokrasi yang mencerminkan adanya tingkat rasionalitas yang tinggi ternyata mampu menggeser peran yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tradisional. Hal ini antara lain

Uraian diatas secara ringkas telah menelaah pendapat yang diintrodusir oleh Weber bahwa dimasyarakat dapat diketemukan tiga cara dominasi. Akan tetapi pada kenyataannya relative sulit untuk dapat menemukan salah satu type dominasi yang berlaku secara murni dimasyarakat. Relative sulit untuk menemukan seorang elit yang keberadaannya, misalnya, hanya karena kharisma yang dimiliki saja, atau hanya karena berdasarkan atas tradisi yang berlaku dimasyarakat setempat. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, akan lebih mudah diketemukan elit yang keberadaannya dikarenakan dimasyarakat yang bersangkutan memberlakukan dominasi 'type campuran' dari dominasi tradisional, kharismatik dan legal- rasional.²⁰

Dalam realitasnya, ketiga tipe dominasi tersebut tampaknya saling berhubungan satu dengan lainnya. Organisasi social birokratis sebagai pengejawantahan tipe dominasi legal-rasional, ternyata dipengaruhi oleh adanya charisma yang dimiliki oleh elit. Demikian pula organisasi social birokrasi ini dalam kenyataannya tidak jarang mempergunakan dukungan yang terdapat pada tradisi yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Dengan melihat adanya saling keterkaitan antara ketiga tipe dominasi tersebut; dapat ditentukan; bagaimanakah bentuk kaitan, dan dalam tingkat yang bagaimana di antara ketiga cara dominasi tadi dapat memberikan dukungan bagi keberadaan seorang elit, atau

Sejak memimpin Pakistan melalui kudeta tak berdarah di tahun 1999, Musharraf mengangkat / merekrut para staf ahli dan pejabat – pejabat pemerintahan yang berasal dari golongan dekatnya. Terutama dari golongan militer dan partainya. Hal ini bisa dilihat dari pengangkatan Abdul Hameed Dogar sebagai Ketua MA baru menggantikan Iftikhar M. Chauddry. Abdul Hameed Dogar adalah orang yang berasal dari partai pendukung Musharraf PML-Q yang dikenal loyal kepada Musharraf.²¹ Selain itu Musharraf juga mengangkat Jenderal Ashfaq Perves Kiani, Mantan Kepala Dinas Intelejen yang dikenal loyal kepadanya sebagai Panglima Tinggi Militer Pakistan. Dilihat dari cara Musharraf mengangkat / merekrut staff pemerintahannya, Musharraf menggunakan pola Traditional Domination dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri Pakistan, Musharraf melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam menumpas gerakan Taliban di Afganistan. Kerjasamanya dengan AS ini membuat ia dikenal dekat dengan AS. Musharraf juga dianggap sebagai pemimpin yang moderat oleh negara-negara Barat. Banyak yang percaya bahwa Musharraf memang tulus dalam keinginannya untuk menjembatani dunia Islam dengan Barat. Sebelumnya, ia telah berbicara keras menentang gagasan bahwa 'benturan antar peradaban' di antara keduanya tidak dapat dielakkan. Lebih jauh, ia menciptakan frasa "Sikap Moderat yang Dicerahkan" dan aktif mempromosikan sikap seperti itu. Di sini

Musharraf menunjukkan kapabilitasnya sebagai elit yang memiliki Kharisma dengan menonjolkan “Sikap Moderat yang Dicerahkan Tersebut”.

Musharraf saat ini juga telah menguasai organisasi – organisasi birokrasi penting seperti Militer dan MA di Pakistan melalui orang – orang kepercayaannya yang duduk organisasi – organisasi birokrasi tersebut. Ditambah lagi ia memberlakukan Negara dalam keadaan darurat yang membuatnya mampu membekukan konstitusi dan memegang penuh kendali atas pemerintahan Pakistan. Dalam hal ini Musharraf juga menggunakan dominasi legal-rasional dalam upaya mempertahankan kekuasaannya.

Dilihat dari uraian diatas, keadaan Perves Musharraf saat ini adalah sebagai elit yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di parlemen Pakistan pada Pemilu Parlemen dengan mengacu pada konsep cara mempertahankan kekuasaan melalui dominasi ‘type campuran’, dimana Musharraf menggunakan dominasi tradisional, kharismatik dan legal- rasional sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.

F. Hipotesa

Dari analisa di atas, penulis mendapatkan suatu hipotesis bahwa Perves Musharraf melakukan langkah – langkah berikut untuk mempertahankan

1. Musharraf berusaha menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki Citra Moderat dengan kebijakan – kebijakan luar negerinya yang pro barat.
2. Musharraf mengisi orang – orang di pemerintahannya dengan orang – orang dekatnya sendiri, sehingga ia lebih mudah mengontrol Pemerintahan pra-pemilu Parlemen 2008.
3. Dengan menguasai organisasi – organisasi birokrasi penting dan membekukan konstitusi Musharraf menjadi lebih leluasa dalam menjalankan kebijakkannya dalam usaha mempertahankan kekuasaan di Parlemen pada Pemilu Parlemen 2008.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dalam penelitian masalah dalam skripsi ini dimulai sejak kepemimpinan Perves Musharraf saat ia berhasil memperoleh kekuasaan melalui kudeta pada tanggal 12 oktober 1999 sampai dengan Pemilu Parlemen 2008.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi tentang pendahuluan, dimana penulis menjabarkan bagaimana keadaan Pakistan Pasca Pemilu Presiden Oktober 2008. Setelah menjabarkan alasan pemilihan judul, penulis selanjutnya menjabarkan mengenai tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II penulis mendeskripsikan tentang latar belakang kehidupan Perves Musharraf.

BAB III penulis menjelaskan dan menjabarkan tentang keadaan Pakistan semasa kepemimpinan Perves Musharraf

BAB IV penulis menjabarkan dan mengulas tentang kebijakan – kebijakan politik Musharraf untuk mempertahankan kekuasaanya pada Pemilu Parlemen 2008.